

PANDANGAN DAN AKTIVITAS POLITIK TOKOH FRONT PEMBELA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN NKRI BERSYARIAH DI KOTA MEDAN

TM Shadrak

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
teukushadrak36@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep NKRI Bersyariah yang digagas oleh FPI bukanlah sebuah model ideologi yang akan menggantikan Ideologi Pancasila. Namun NKRI Bersyariah dengan keutamaan syariat Islam dapat berdampingan dengan Pancasila itu sendiri. Dalam pandangan tokoh-tokoh FPI Kota Medan, konsep NKRI Bersyariah bukanlah sebuah konsep yang mempertentangkan konsep pancasila dan sistem demokrasi di Indonesia. NKRI Bersyariah merupakan sebuah konsep alternatif sebagai solusi untuk menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di Kota Medan, aktivitas politik tokoh-tokoh FPI Kota Medan untuk mewujudkan NKRI Bersyariah.

Kata Kunci: Politik, FPI, NKRI, Syariah, Kota Medan

Abstract

The results of this research indicate that the concept of Sharia NKRI initiated by FPI is not an ideological model that will replace the Pancasila Ideology. But the Islamic NKRI with the primacy of Islamic Shari'a can coexist with the Pancasila itself. In the view of Medan FPI figures, the concept of Sharia NKRI is not a concept that contradicts the concept of Pancasila and the democratic system in Indonesia. NKRI Bersyariah is an alternative concept as a solution to solve all problems and problems faced by the Indonesian nation. In Medan City, the political activities of FPI figures in Medan City to realize Sharia NKRI.

Keywords: Political, FPI, NKRI, Sharia, Medan City

Pendahuluan

Front Pembela Islam (selanjutnya disingkat FPI) merupakan organisasi keislaman yang resmi berdiri pada tahun 1998. Kemunculan FPI merupakan konsekuensi dari perubahan geopolitik Indonesia di tahun itu, dari masa Orde Baru ke masa reformasi, dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Sejak era reformasi pada tahun 1998, kondisi sosio-politik Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental.¹ Berbagai kekuatan politik dan juga ormas keagamaan bermunculan.² Oleh sebab itu, kemunculan FPI merupakan bagian dari proses demokrasi itu sendiri.³

Front Pembela Islam merupakan ormas keagamaan (Islam) yang muncul dengan tujuan mengusung pergerakan Islam untuk menyelamatkan umat. Agenda dan perjuangan FPI yang utama ialah gerakan *makruf nahi munkar*, dan untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan

narkoba. Bagi aktivis FPI, upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi krisis moral yang melanda bangsa ini adalah dengan melakukan kerjasama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi kaum ulama, pemerintah, dan seluruh umat Islam.⁴

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, FPI memilih jalan untuk tetap tunduk dan ikut dalam sistem demokrasi Indonesia. Di sinilah letak perbedaan FPI dengan gerakan radikal Islam lainnya seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Darul Islam dan Hizbut Tahrir, yang menginginkan sistem khilafah menjadi sistem tatanan dan hukum bernegara. Oleh karena itu jelas pemerintah tidak bisa membubarkan FPI sebagai gerakan radikal, mengingat bahwa posisi politik mereka tetap mendukung pemerintah dalam hal demokrasi.⁵

Meskipun pro terhadap demokrasi, namun Habieb Riziq sebagai pimpinan dan penggerak FPI di Indonesia memiliki agenda dan perhatian khusus terhadap penegakan syariat Islam di Indonesia. Bagi Rezieq, pergerakannya dalam bidang politik tidak akan pernah lari dan keluar dari ajaran Islam sebagai arah dan panduan berjuang untuk menegakkan syariat Islam.⁶ Perjuangan untuk memasukkan syariat Islam pada hukum tata negara di Indonesia merupakan bagian dari upaya dan komitmen Rizieq dalam memperjuangkan dalam ruang perpolitikan di Indonesia.⁷ Semangat inilah yang kemudian mengilhami para anggota dan juga simpatisan FPI untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam tekstual.

Arah perjuangan dan agenda politik FPI, sebagaimana dijelaskan oleh Ian Wilson, seorang peneliti dari *Asia Research Centre and Lecturer in Politics, School of Management & Governance, Murdoch University* menulis dalam sebuah artikel berjudul *Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia's 2014 Elections* ialah menginginkan kembalinya Piagam Jakarta dalam Konstitusi Indonesia, khususnya penambahan enam kata untuk prinsip pertama Pancasila, di mana "Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa" memenuhi syarat dengan "kewajiban untuk mengikuti Syariah Islam bagi semua Muslim". Bagi FPI, penghapusan 7 kata dalam sila pertama Pancasila melalui amandemen merupakan bentuk pengkhianatan historis.⁸ Menurut FPI pengembalian Syariat Islam di Indonesia merupakan *khittah* perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan.⁹

Sepak terjang dan perjuangan FPI dalam rangka mengembalikan Piagam Jakarta sebagai konstitusi Indonesia dapat dilihat pada tahun 2000 dalam agenda sidang MPR. Di masa ini, FPI mendapatkan momentum untuk memasukkan agenda pengembalian Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, namun gagal di tengah jalan. Kemudian FPI mencoba membangun narasi untuk tidak memilih pemimpin non muslim, tidak memilih pemimpin perempuan, tetapi mengajak memilih pemimpin yang kuat agamanya. Narasi seperti ini kemudian di turunkan ke tingkat daerah-daerah dengan harapan bahwa jika pemimpin daerah kuat agamanya (keislamannya), maka syariat Islam akan menjadi landasan dalam merumuskan peraturan daerah.¹⁰ Namun faktanya, pergerakan politik seperti ini tidak cukup ampuh untuk mewujudkan cita-cita FPI.

Geliat perjuangan FPI tidak berhenti untuk dapat mengembalikan Piagam Jakarta sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam Munas tahun 2012 di Bogor, FPI mengevaluasi gerakannya yang dinilai tidak signifikan tersebut,

kemudian mengganti agenda pergerakan politiknya dengan menyerukan kepada kader/anggota dan simpatisannya untuk memilih partai Islam seperti PKB, PPP, PKS, PBB. Melalui agenda ini, FPI berharap pemimpin yang diusung terpilih menjadi kepala daerah, maka selanjutnya FPI akan mencoba menawarkan agenda-agendanya supaya menjadi undang-undang di daerah. Dengan demikian, untuk mewujudkan syariat Islam ditingkat nasional akan lebih mudah dilakukan. Jadi, pada akhirnya proses syariatisasi ini akan berujung untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai ideologi bangsa. Cara gerak seperti masih jarang diketahui oleh orang di luar FPI. Sampai saat ini gerakan seperti ini masih terus dilakukan.¹¹

Agenda politik yang demikian inilah yang pada titik tertentu menjadikan pergerakan FPI sebagai ormas keagamaan (Islam) mengalami “pasang surut” dan bahkan dapat dikatakan kurang mendapat perhatian di masyarakat, khususnya dari sebagian besar kalangan umat muslim di tanah air. Meskipun FPI mendukung demokrasi sebagai sebuah sistem bernegara yang dianut Indonesia, namun tetap saja muncul penolakan-penolakan dan kritik oleh berbagai kalangan. Bagi mereka yang menolak agenda politik FPI beranggapan bahwa upaya syariatisasi Islam yang diusung oleh FPI dalam agenda politiknya dapat mengancam tatanan keutuhan NKRI. Karena pada dasarnya, sistem dan tatanan bernegara di Indonesia yang telah dirumuskan oleh para *founding fathers* merupakan sesuatu yang telah *final*.

Namun pasca gerakan 212, FPI mendapatkan momentum kebangkitan untuk kembali menyuarakan penting syariat Islam masuk dalam dimensi hukum di Indonesia. Memontum ini muncul dari keberhasilan mereka menggalang kekuatan umat muslim tanah air untuk ikut menyuarakan dan menuntut pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus penistiahan agama (Islam).

Pasca gerakan 212, agenda politik FPI yang selama ini bersemayam di bawah permukaan, kini muncul kepermukaan sebagai kekuatan agenda politik yang diperhitungkan. Melalui tokoh dan sekaligus pimpinan FPI, Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab atau yang dikenal dengan Habib Rizieq Shihab, FPI mengusung agenda politik yang disebut NKRI Bersyariah. Menurut Rizieq konsep NKRI Bersyariah bukanlah sebuah model ideologi yang akan menggantikan Ideologi Pancasila. Namun NKRI Bersyariah dengan keutamaan syariat Islam dapat berdampingan dengan Pancasila itu sendiri. Habib Rizieq berkeyakinan bahwa NKRI Bersyariah merupakan *rule model* yang tepat untuk tatanan dan sistem bernegara di Indonesia untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Muslim dan juga Indonesia sebagai sebuah negara dan sekaligus dapat mengantarkan bangsa ini menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Konsep NKRI Bersyariah yang digaungkan oleh FPI berdasarkan buah pemikiran pimpinannya, Habib Rizieq Shihab, mendapat respon positif dari sebagian umat muslim di tanah air, khususnya anggota FPI itu sendiri— bahkan juga sebagian besar tokoh dan ormas keagamaan yang ikut dalam gerakan 212. Melalui jejaring keorganisasian FPI, semangat mengusung konsep NKRI Bersyariah doktrin dan gagasan NKRI Bersyariah ini kemudian menyebar dengan masif ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk juga di Kota Medan.

Di kota Medan, khususnya Sumatera Utara, semangat FPI untuk mengusung konsep NKRI Bersyariah yang dikumandangkan oleh Habie Rizieq merupakan sebuah intruksi yang mesti diperjuangkan. Karena pada dasarnya konsep NKRI Bersyariah merupakan alternatif yang ditawarkan FPI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.¹² Bagi FPI, semangat untuk mengusung terwujudnya konsep NKRI Bersyariah merupakan upaya untuk menegakkan *amar makruf nahi munkar* dalam ruang perpolitikan tanah air. Segenap lapisan kepengurusan FPI, mulai dari pusat hingga ke wilayah, menyakini bahwa upaya menegakan NKRI Bersyariah harus ditempuh lewat langkah-langkah dan aktivitas politik yang nyata.

Dalam ruang perpolitikan di Kota Medan, kiprah dan sepak terjang FPI dalam lingkup politik praktis tidak begitu terlihat di permukaan—khususnya sebelum gerakan 212. Hal ini dikarenakan FPI bukanlah sebuah partai politik ataupun organisasi sayap partai yang secara langsung terlibat dalam kontestasi politik di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kota Medan mengetahui FPI sebagai sebuah organisasi keagamaan (Islam) yang menyerukan dan bertindak untuk menegakkan *amar makruf nahi munkar*. Bahkan tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa FPI merupakan organisasi yang syarat akan tindakan kekerasan dalam aksi-aksi menegakkan *amar makruf nahi munkar*.

Meskipun gaung pergerakan politik FPI di Kota Medan tidak begitu tampak di permukaan, namun bukan berarti pergerakan FPI dalam ruang perpolitikan di Kota Medan dikatakan hampa (kosong). Berdasarkan pengamatan penulis, aktivitas politik FPI di Kota Medan dapat dilihat dari Pemilihan Walikota Medan tahun 2015. pada perhelatan pemilihan Walikota Medan pada tahun 2015, aktivitas FPI diarahkan untuk mendukung dan memenangkan salah satu calon yang bertanding. Karena pada prinsipnya dukungan yang diberikan oleh FPI mengarah kepada calon yang terus mendukung dan mengawal kepentingan umat Islam di Kota Medan.¹³

Di tahun 2018 pada kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Utara, FPI juga turut andil dalam aktivitas politik. Aktivitas politik pengurus dan kader FPI diarahkan mendukung pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Bagi FPI, pasangan tersebut dianggap mewakili kepentingan umat Islam.¹⁴ Selain keterlibatan FPI Kota Medan dalam pemilihan kepada daerah, para tokoh FPI di Kota Medan juga ikut serta sebagai juru kampanye yang kemudian ikut mempromosikan calon-calon anggota DPRD di kota Medan untuk bertarung nantinya di pemilihan anggota legislatif.¹⁵ Bagi FPI, memberikan dukungan dan berupaya memangkan calon anggota legislatif merupakan bagian aktivitas politik yang sangat relevan untuk memperjuangkan cita-cita FPI.

Pada dasarnya, kegiatan pemilihan kepala daerah menjadi agenda penting dalam aktivitas politik para tokoh FPI. Mendukung pemimpin yang memperjuangkan aspirasi umat Islam merupakan upaya untuk menegakan *amar makruf nahi munkar*. Bagi FPI, apabila seorang pemimpin beragama Islam dan taap pada agama (Islam), maka spirit dalam menjalankan pemerintahan akan dilandasi oleh semangat keislaman. Untuk itu, FPI selalu berdakwah untuk tidak memilih pemimpin non muslim, tidak memilih pemimpin perempuan, tetapi mengajak memilih pemimpin yang kuat agamanya (Islam).

Jika diamati dan dianalisa, pola aktivitas politik FPI Kota Medan mengikuti pola aktivitas pergerakan FPI di tingkat pusat maupun di tingkat daerah lainnya. Aktivitas dukung-mendukung pasangan calon yang berkontestasi dalam panggung politik merupakan bentuk nyata dari aktivitas politik PFI. Pola aktivitas politik FPI yang demikian dikarenakan FPI bukanlah sebuah partai politik ataupun organisasi sayap partai yang secara langsung terlibat dalam kontestasi politik di Indonesia.

Berdasarkan paparan tentang aktivitas PFI dalam ruang politik, bahwa FPI bukan saja ormas keagamaan yang hanya bergerak pada kegiatan dakwah untuk menegakkan *amar makruf nahi munkar* semata. Tetapi aktivitas FPI juga merambah pada ruang perpolitikan di Indonesia. Aktivitas dan keterlibatan FPI dalam ruang politik bertujuan untuk menegakan syariat Islam dengan mengembalikan Piagam Jakarta sebagai ideologi negara. Namun pasca gerakan 212, FPI menginginkan terwujudnya sebuah konsep negara yang disebut dengan NKRI Bersyariah. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menguraikan, menganalisis, dan menjelaskan tentang “Pandangan dan Aktivitas Politik Front Pembela Islam (FPI) dalam upaya mewujudkan NKRI Bersyariah di Kota Medan”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah utamayang diangkat dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Kota Medan tentang konsep NKRI Bersyariah?
2. Mengapa tokoh-tokoh FPI menjadikan konsep NKRI Bersyariah menjadi agenda penting untuk diwujudkan di Indonesia?
3. Bagaimana aktivitas politik tokoh Front Pembela Islam (FPI) Kota Medan dalam mewujudkan konsep NKRI Bersyariah?

Batasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari dari kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan tentang judul yang akan diteliti ini, maka penulis memberikan penjelasan pengertian terhadap beberapa kata yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Front Pembela Islam (FPI), adalah ormas Islam yang lahir pasca reformasi tahun 1998. FPI lahir untuk menjawab persoalan sosial dan keummatan yang ada di Indonesia. Dengan semboyan *Amar Makruf Nahi Mungkar* FPI hadir selalu di garda depan dalam menyelesaikan masalah keumatan seperti perjudian dan minuman keras.
2. Pandangan politik. Dalam KBBI, pandangan diartikan sebagai “membentangkan pendapat tentang sesuatu hal”.¹⁶ Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pandangan politik ialah pendapat atau argumentasi politik tokoh-tokoh FPI Kota Medan tentang konsep NKRI Bersyariah.
3. Aktivitas politik, adalah usaha yang di tempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan dan negara. Aktivitas politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.¹⁷ Aktivitas politik ini dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya seperti: berpartisipasi dalam pemilihan umum, ikut dalam kontestasi pemilihan umum, *lobbying* politik, menjadi kontrol terhadap sistem pemerintah, membangun jaringan politik, dan sebagainya.

4. NKRI Bersyariah, merupakan konsep negara yang dikemukakan oleh Muhammad Habieb Rizieq, tokoh dan sekaligus pimpinan Front Pembela Islam tingkat Nasional. Konsep NKRI Bersyariah ini menjadi acuan bagi DPD FPI dan DPW FPI Se-Indonesia dalam pergerakan dan aktivitas politik tokoh-tokoh FPI di setiap wilayah.

Berdasarkan point di atas, yang dimaksud pandangan politik ialah pendapat ataupun argumentasi tokoh-tokoh FPI Kota Medan tentang konsep NKRI Bersyariah. Sedangkan aktivitas politik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebuah keaktifan yang dilakukan dengan oleh tokoh-tokoh FPI Kota Medan sebagai usaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mewujudkan NKRI Bersyariah.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini ialah menjelaskan secara akademis tentang aktivitas politik FPI Kota Medan dalam upaya mewujudkan NKRI Bersyariah dalam lingkup wilayah Kota Medan. Adapun tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan tokoh FPI Kota Medan tentang konsep NKRI Bersyariah.
2. Menjelaskan tentang pentingnya konsep NKRI Bersyariah diwujudkan di Indonesia.
3. Menjelaskan aktivitas politik tokoh Front Pembela Islam (FPI) dalam mewujudkan konsep NKRI Bersyariah?

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis:
 - a. Menjadi referensi ilmiah bagi kalangan akademik, aktivis maupun masyarakat secara luas terkait tentang aktivitas politik Front Pembela Islam (FPI) dalam rangka mewujudkan NKRI Bersyariah di Kota Medan.
 - b. Menjadi khasanah intelektual dalam rangka pengembangan teori-teori dalam disiplin ilmu pemikiran politik Islam, terkhusus dalam kajian gerakan/aktivitas politik non-partai atau ormas keagamaan.
2. Secara praktis:

- a. Menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi setiap orang, khususnya bagi pemimpin politik, praktisi dan akademisi dalam melihat munculnya satu gerakan keagamaan.
- b. Sebagai literatur bagi para pembaca di perpustakaan dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kerangka Teori

Untuk mempermudah menganalisis data-data dalam penelitian, peneliti menggunakan teori dari Greg Fealy¹⁸ yang terdapat dalam artikelnya *Islamic Radicalism in Indonesia*. Dalam tulisan yang diterbitkan oleh *Southeast Asian Affair 2004* tersebut Fealy mencoba melihat kebangkitan gerakan radikal pasca Orde Baru serta pengaruhnya dalam perpolitikan di Indonesia. Fealy melihat adanya kebangkitan gerakan Islam yang menyerukan untuk kembali kepada hukum-hukum Islam atau syariat Islam.

Bangkitnya gerakan-gerakan radikal tersebut tidak terlepas sistem demokrasi terbuka yang dianut Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan dan ideologi gerakan-gerakan radikal tersebut pada umumnya memiliki persamaan, yakni menegakan syariat Islam. Mereka menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Hal ini wajar saja terjadi karena mereka melihat bagaimana proses demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan syariat Islam sebagai bagian dari jalan kehidupan selain Alquran dan Hadis.¹⁹

Fealy mencatat paling tidak ada enam kelompok besar yang mewakili gerakan radikal di Indonesia di awal-awal reformasi. Keenam kelompok tersebut adalah Darul Islam (DI), Jemaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah/ Lakar Jihad (FKAWJ/ LJ), Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir (HT).²⁰

Untuk membedakan ideologi dan tujuan dari gerakan-gerakan tersebut, Greg Fealy membaginya menjadi 4 indikator di antaranya syariat Islam, negara Islam, khilafah dan demokrasi. Untuk lebih lanjutnya lihat tabel di bawah ini:

No	Kelompok	Syariat Islam	Negara Islam	Khilafah	Demokrasi
1	Darul Islam	Ya	Ya	Tidak	Tidak
2	Jamaah Islamiyah	Ya	Ya	Ya	Tidak
3	Majelis Mujahidin Indonesia	Ya	Ya	Ya	Tidak
4	Front Pembela Islam	Ya	Tidak	Tidak	Ya
5	FKAWJ/ Laskar Jihad	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
6	Hizbut Tahrir	Ya	Ya	Ya	Tidak

Berdasarkan tabel diatas, peneliti berpendapat bahwa dalam hal Syariat Islam, ke-enam kelompok tersebut sepakat mengusungnya sebagai salah satu tujuan gerakan. Sementara pendirian Negara Islam, hanya FPI dan FKAWJ yang tidak mengusung perjuangan mendirikan Negara Islam. Selanjutnya dalam hal perjuangan khilafah, Darul Islam, FPI dan FKAWJ tidak menginginkan Negara Indonesia berubah menjadi kekhalifahan. Terakhir

adalah persoalan demokrasi. dari keenam kelompok tersebut hanya FPI yang mendukung sistem demokrasi di Indonesia.

Perbedaan yang terjadi dalam mengorientasikan ideologi dan arah gerakan tersebut semakin memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dimanakah posisi atau sikap politik Front Pembela Islam? Bila melihat tabel dapat disimpulkan bahwa FPI menginginkan adanya syariat Islam dan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, teori lain yang digunakan untuk menganalisis aktivitas/partisipasi politik FPI Kota Medan ialah teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Lewat penelitian mereka, Huntington and Nelson memberikan suatu catatan: aktivitas yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian aktivitas politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi/aktivitas politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*). Bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik. Menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson aktivitas politik terbagi menjadi empat kegiatan.²¹ Diantaranya adalah:

1. Partisipasi politik yaitu kegiatan memberikan suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi seorang calon legislatif ataupun eksekutif dan lain-lain.
2. *Lobbying* politik; upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil tentang suatu isu tertentu.
3. Kegiatan organisasi; yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinan, guna mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah.
4. Mencari koneksi, (*contacting*); upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat pemerintahan guna mempengaruhi keputusan dan manfaat untuk individu maupun kelompok.
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kerangka konseptual ini nantinya akan membantu untuk melihat kecenderungan arah politik yang diusung oleh FPI dalam gerakannya. Sejauh mana keterlibatan para tokoh FPI dalam mewarnai dinamika politik yang berkembang di kota Medan serta pengaruh mereka dalam politik tersebut.

Kesimpulan

Front Pembela Islam (FPI) organisasi keagamaan (keislaman) yang lahir dengan semangat dan tujuannya memberantas kemasiatan dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun FPI merupakan organisasi keagamaan namun FPI memiliki agenda dan perjuang politik, yaitu menegakkan syariat Islam untuk mewujudkan NKRI Bersyariah. NKRI Bersyariah merupakan gagasan pemikiran Habieb Rizieq, tokoh dan sekaligus pimpinan nasional FPI. NKRI Bersyariah bukanlah sebuah model ideologi yang akan menggantikan Ideologi Pancasila. Namun NKRI Bersyariah dengan keutamaan syariat Islam dapat berdampingan dengan Pancasila itu sendiri.

Dalam pandangan tokoh-tokoh FPI Kota Medan, NKRI Bersyariah adalah sebuah konsep yang tidak bertentangan dengan pancasila dan sistem demokrasi di Indonesia. Sejalan dengan pandangan Habieb Rizieq, tokoh-tokoh FPI Kota Medan memahami konsep NKRI Bersyariah sebagai pilar negara yang dapat bersandingan dengan pancasial dalam sistem demokrasi di Indonesai. Bagi tokoh FPI Kota Medan, NKRI Bersyariah merupakan sebuah konsep alternatif sebagai solusi untuk menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya bangsa ini secara keseluruhan. Dengan munculnya konsep NKRI Bersyariah ini, maka seluruh lapisan pergerakan FPI, baik tokoh, pengurus, kader, maupun simpatisan FPI turut memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam bingkai NKRI Bersyariah.

Di Kota Medan, aktivitas politik tokoh-tokoh FPI Kota Medan untuk mewujudkan NKRI Bersyariah dapat dilihat dari 4 hal yang saling berkaitan, yaitu:

1. Partisipasi politik; bentuk partisipasi politik yang dilakukan tokoh-tokoh FPI Kota Medan ialah dengan memberikan dukungan dan memperjuang calon kepala daerah, baik tingkat Kota Medan maupun tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang berkontestasi dalam pemilu. Landasan dukungan yang diberikan tokoh FPI Kota Medan kepada calon kepala daerah ataupun calon anggota legeslatif yang dinilai dapat berpihak dan memperjuangkan aspirasi umat islam sebagaimana yang menjadi cita-cita FPI. Bentuk nyata dukungan tokoh FPI Kota Medan dapat dilihat dari seruan dan ajakan melalui ceramah, tausiah untuk mendukung calon yang memiliki keterpihakan kepada umat Islam.
2. *Lobbying* politik; dalam konteks ini, aktivitas politik tokoh FPI Kota Medan diarahkan untuk melakukan lobi-lobi ke para pejabat pemerintahan, Kepolisian, TNI, maupun pimpinan Partai Politik. Dalam *lobbying* politik FPI akan mencoba menawarkan atau bahkan menitipkan agenda-agendanya tentang syariat Islam dalam rangka penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* agar menjadi undang-undang di daerah yang berpihak pada umat Islam, pembangkitan ekonomi umat Islam dan kesejahteraan ummat Islam.
3. Membangun koneksi/jaringan politik; Dalam konteks ini, tokoh FPI kota Medan mencari koneksi ke pejabat-pejabat/ pimpinan pemerintahan dan aparat penegak hukum (Kepolisian dan TNI), partai politik, dan bahkan pada tingkatan lurah dan kepala lingkungan atau tokoh masyarakat di Kota Medan. Tujuan nya

untuk mencari dukungan politik terhadap agenda dan perjuang FPI untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bingkai NKRI Bersyariah. Agenda ini sangat penting dilakukan oleh anggota-anggota FPI agar mendapatkan dukungan dan *support* dari pemerintah atas program-program kerja yang nantinya mereka lakukan.

4. Ikut dalam konstestasi politik Praktis; meskipun di dalam AD/ART organisasi FPI tidak diatur tentang boleh tidaknya tokoh ataupun kader FPI keterlibatan dalam berpolitik, namun tetap saja FPI tidak bisa lepas dari isu dan keterlibatannya dalam ruang politik. Sejauh ini memang peran FPI dalam dunia politik tidak terlalu terlihat seperti ormas lainnya karena memang fokusnya adalah terhadap pemberantasan masalah-masalah sosial dan penyakit masyarakat. Di Kota Medan terdapat 5-6 anggota FPI yang akan ikut tampil dalam kontestasi pileg 2019. Salah satu diantaranya adalah Hariman Syahputra Siregar S.Kom, Caleg DPRD Kota Medan yang di dukung Partai Bulan Bintang sekaligus Anggota FPI Medan Marelان. Keikutsertaan tokoh-tokoh ataupun kader-kader FPI Kota Medan bukan bertujuan untuk kekuasaan atau suatu kepentingan semata. Tetapi bertujuan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* guna tegaknya syariat Islam dalam bingkai NKRI Bersyariah
5. *Preassure* sebagai kontrol terhadap pemerintah; FPI menjadi garda terdepan dalam mengingatkan pemerintah dan menekan pemerintah bila mana pemerintah tidak menjalankan aturan dan undang-undang secara maksimal. Dalam ruang lingkup Kota Medan, Pada dasarnya, *preassure* yang diberikan FPI kepada pemerintah biasanya berbentuk teguran dan himbauan kepada pemerintah ketika pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada umat muslim. Cara yang dilakukan adalah dengan bermediasi dengan pemerintah, menggelar pertemuan dan rapat dengar pendapat. Adapun bentuk kontrol langsung yang dilakukan oleh tokoh FPI Kota Medan ialah berupa demo-demo yang dilakukan oleh FPI merupakan bentuk desakan/ *preassure* kepada pemerintah untuk bersikap tegas terhadap isu-isu yang terjadi, diantaranya mendesak pemerintah agar mengambil tindakan tegas terhadap kekejaman Israel. Dalam aksi bela muslim Rohingya, mendesak agar pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Myanmar. Kemudian memperingati pemerintah dan pihak-pihak lain untuk tidak melakukan intervensi terhadap kasus Meliana yang terlibat dalam kasus penistaan agama. Dan terakhir ialah demo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama di kepulauan seribu.

Daftar Pustaka

- Guillermo O' Donnel dan C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (Jakarta: LP3ES, 1993)
- Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) h.132.
- Jajang Jahroni, "Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003 dalam Studi Islamica Indonesian Journal of Islamic Studies" Volume 11. No 2. 2004,
- Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani, "Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring" dalam Jurnal "Pemikiran Sosiologi" Volume 4 No. 2, Agustus 2017
- Abidatu lintang pradipta, et.al. *Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (aksi 212) di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika* dalam Jurnal "Informasi Kajian Ilmu Komunikasi" Volume 48. Nomor 1. Juni 2018.
- Ian Wilson, "Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia's 2014 Elections" (Singapura, 2014
- Dalam Artikel *Plus Minus FPI Jadi Partai Politik*, <https://pinterpolitik.com/plus-minus-fpi-jad-parpol/>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Greg Fealy, "Islamic Radicalism in Indonesia, The Faltering Revival?" (Southeast Asian Affairs 2004).
- Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

¹Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter (1993) menyebutkan bahwa transisi yang terjadi di tahun 1998 tidak otomatis menjadikan negara dan bangsa demokratis setelah menjatuhkan rezim otoriter. Di satu sisi transisi dibatasi oleh proses perpecahan sebuah rezim, dan disisi lain, pengesahan beberapa bentuk demokrasi; kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner. Kemungkinan-kemungkinan ini membuktikan bahwa masa transisi adalah masa yang tidak menentu. Karena sudah menjadi ciri transisi bahwa selama masa itu, aturan main politik sama sekali tidak menentu. Tidak saja karena aturan main tersebut bekerja dalam perubahan yang terus menerus terjadi, tapi juga karena biasanya aturan tersebut dipertarungan dengan sengit. bila memang ada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang efektif, itu cenderung dalam genggamannya pemerintahan otoriter. Secara longgar atau ketat tergantung pada kasus atau taraf transisi para penguasa ini berusaha mempertahankan kekuasaan sewenang-wenang untuk menentukan aturan-aturan dan hak-hak, yang dalam kondisi demokrasi yang mantab umumnya dilindungi secara bertanggung jawab oleh undang-undang dan berbagai lembaga independen. Guillermo O'Donnell, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies* (Maryland: John Hopkins University Press, 1993) h.73. Lihat juga Guillermo O' Donnel dan C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (Jakarta: LP3ES, 1993) h. 6-7.

²Kemunculan kekuatan politik dan ormas keagamaan ini dapat dilihat dari 2 tipikal, yakni tipikal secara struktural dan kultural. Tipikal pertama ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam, seperti PK (Partai Keadilan) yang kemudian sekarang

bertransformasi menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PBB (Partai Bulan Bintang), PKU (Partai Kebangkitan Umat), PNU (Partai Nahdlatul Ummat), dan Partai Masyumi Baru. Sebelumnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) terlebih dulu eksis di masa Orde Baru. Tipikal kedua ditandai dengan menjamurnya sejumlah gerakan (Ormas) Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi *Ahlussunah wal jamaah* (FKASW) yang kemudian populer dengan sebutan Laskar Jihad, *Ikhwanul Muslimin*, Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin menyusul gerakan Islam lainnya yang sudah berdiri di masa Orde Baru. Bangkitnya gerakan (ormas) Islam ini diwarnai dengan karakternya yang formalistik, militan dan radikal. Baca Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) h.132.

³Jajang Jahroni, “*Defending the Majesty of Islam: Indonesia’s Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003* dalam Studi Islamica Indonesian Journal of Islamic Studies” Volume 11. No 2. 2004, Jakarta. h. 205.

⁴*Op.cit.*, h. 130.

⁵*Ibid.*, h.10.

⁶Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani, “*Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring*” dalam Jurnal “Pemikiran Sosiologi” Volume 4 No. 2, Agustus 2017, h. 4-10.

⁷Abidatu lintang pradipta, et.al. *Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (aksi 212) di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika* dalam Jurnal “Informasi Kajian Ilmu Komunikasi” Volume 48. Nomor 1. Juni 2018.

⁸Ian Wilson, “*Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia’s 2014 Elections*” (Singapura, 2014. h. 4.

⁹*Ibid.*, h.5

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,

¹²Pernyataan didasarkan dari hasil wawancara dengan Habib Hud, Ketua DPD FPI Sumatera Utara.

¹³Dalam Artikel *Plus Minus FPI Jadi Partai Politik*, <https://pinterpolitik.com/plus-minus-fpi-jad-parpol/>.

¹⁴Pernyataan didasarkan dari hasil wawancara dengan Habib Hud, Ketua DPD FPI Sumatera Utara.

¹⁵Pernyataan didasarkan dari hasil wawancara dengan Habib Hud, Ketua DPD FPI Sumatera Utara.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

¹⁷*Ibid.*, h. 79.

¹⁸Greg Fealy adalah Associate Professor dan dosen Australia National University, Canberra. Minat kajiannya terkiat dengan Politik Islam, Politik Indonesia dan Demokrasi serta Sejarah.

¹⁹Greg Fealy, “*Islamic Radicalism in Indonesia, The Faltering Revival?*” (Southeast Asian Affairs 2004). h.40.

²⁰Greg Fealy, “*Islamic Radicalism in Indonesia, The Faltering Revival?*” (Southeast Asian Affairs 2004). h.40.

²¹Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). h. 16-17.